MUSYTARI

Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi

Vol 25 No 12 Tahun 2026

ISSN : 3025-9495

KETERLIBATAN TNI DALAM MENDUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI CIREBON: TINJAUAN EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM

Abu Rohmat[1], Andi Muhammad Yudhistira[2], Erla Deliyana[3], Salwa Mumtazah[4], Septiyani Nur Rohanah[5]

[1-5] Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Bunga Bangsa

Korespondensi penulis: Aburohmat1234@gmail.com, andimuhammadyudhistira@gmail.com, erladeliyan19@gmail.com, salwaa.mum@gmail.com, septiyaninurr01@gmail.com.

ABSTRACT

Food security is not only related to the quantity of food production but also to the ability of communities to access sufficient, safe, affordable, and sustainable food. In Cirebon, this issue is closely linked to the sustainability of agricultural land, farmers' welfare, the vulnerability of local food enterprises, and inter-agency coordination. This article examines the potential and limitations of the involvement of the Indonesian National Armed Forces (TNI), particularly territorial units, in supporting food security programs in the Cirebon region from the perspective of Islamic Development Economics. The study employs a descriptive-analytical literature review by examining journal articles published between 2024 and 2026, as well as studies addressing the role of the TNI and agricultural conditions in Cirebon. The findings indicate that the TNI has the potential to support field coordination, community communication, mutual cooperation activities, and distribution preparedness when necessary. However, the reviewed sources are insufficient to conclude that all these activities have been implemented uniformly throughout Cirebon. Therefore, this article distinguishes between locally documented evidence and recommendations for implementation. From the perspective of Islamic Development Economics, the involvement of the TNI should be directed toward promoting public welfare (maslahah), protecting farmers' livelihoods, ensuring equitable access to food, and maintaining environmental sustainability, while positioning civilian government institutions, agricultural extension officers, and farmer groups as the primary actors in development.

***Keywords**: Indonesian National Armed Forces (TNI), Food Security, Cirebon, Islamic Development Economics, Farmer Empowerment.*

ABSTRAK

Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan jumlah produksi, tetapi juga kemampuan masyarakat memperoleh pangan yang cukup, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Di Cirebon, isu ini berhubungan dengan keberlanjutan lahan pertanian, kesejahteraan petani, kerentanan usaha pangan lokal, serta koordinasi antarinstansi. Artikel ini membahas potensi dan batas keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya satuan teritorial, dalam mendukung program ketahanan pangan di wilayah Cirebon melalui perspektif Ekonomi Pembangunan Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka deskriptif-analitis dengan menelaah artikel jurnal terbitan 2024-2026 serta kajian yang membahas peran TNI dan kondisi pertanian Cirebon. Hasil kajian menunjukkan bahwa TNI berpotensi mendukung koordinasi lapangan, komunikasi masyarakat, kegiatan gotong royong, dan kesiapsiagaan distribusi apabila dibutuhkan. Namun, sumber yang ditelaah belum cukup untuk menyatakan bahwa seluruh bentuk kegiatan tersebut telah terlaksana secara merata di Cirebon. Oleh karena itu, artikel

Article history

Received: November 2026

Reviewed: November 2026

Published: November 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 12 Tahun 2026
ISSN : 3025-9495

membedakan bukti lokal dari rekomendasi penerapan. Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, keterlibatan TNI perlu diarahkan pada kemaslahatan, perlindungan penghidupan petani, keadilan akses pangan, dan keberlanjutan lingkungan, dengan tetap menempatkan pemerintah sipil, penyuluh pertanian, dan kelompok tani sebagai aktor utama pembangunan.
Kata kunci: TNI, Ketahanan pangan, Cirebon, Ekonomi pembangunan Islam, Pemberdayaan petani.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan bagian penting dari pembangunan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kestabilan harga, pendapatan rumah tangga, dan kemampuan masyarakat menghadapi guncangan. Ketersediaan pangan pada tingkat nasional belum tentu menjamin akses yang merata bagi setiap keluarga, sebab daya beli, distribusi, kualitas infrastruktur, dan kondisi produksi lokal ikut menentukan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Penelitian lintas provinsi yang terbit pada 2026 menempatkan pendapatan pertanian, kendala produksi, dan dukungan kebijakan sebagai unsur yang perlu dianalisis bersama ketika menilai ketahanan rumah tangga petani. (Ganesh Kulkarni, M. Dobe, M. Ravi, R. Verma, S. Dutt, S. Dutta, 2023).

Kabupaten Cirebon memiliki kepentingan tersendiri dalam pembahasan ini karena keberlanjutan pertanian pangan berkaitan dengan perlindungan lahan dan tata kelola sumber daya. Studi tahun 2024 mengenai identifikasi karakteristik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Cirebon menggunakan survei dan analisis spasial untuk mengenali kondisi lahan yang berpotensi dipertahankan bagi produksi pangan. Kajian tersebut menempatkan penyusutan lahan dan konversi sawah sebagai persoalan yang dapat mengganggu keberlanjutan produksi, sehingga perlindungan lahan perlu menjadi bagian dari kebijakan pangan jangka panjang. (Hakim, 2024).

Kondisi pangan daerah juga tidak dapat dipersempit hanya pada komoditas beras. Penelitian mengenai kerentanan usaha garam rakyat di Desa Bungko Lor, Kabupaten Cirebon, menunjukkan relevansi penghidupan berbasis sumber daya lokal dalam pembahasan kerentanan ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi pengingat bahwa strategi pangan perlu memperhatikan keragaman mata pencaharian, karakter wilayah, dan kondisi lingkungan yang memengaruhi usaha masyarakat. (Agustya et al., 2024).

Dalam pelaksanaan program pangan, TNI khususnya TNI Angkatan Darat memiliki jaringan satuan teritorial yang berpotensi membantu komunikasi dan koordinasi kegiatan. Penelitian di Kodim 0816/Sidoarjo yang terbit pada 2025 menguraikan keterlibatan TNI AD melalui pemberdayaan petani, koordinasi lintas pihak, dan dukungan distribusi sumber daya. Temuan dari Sidoarjo dapat dijadikan pembanding untuk memikirkan bentuk dukungan yang mungkin diterapkan di Cirebon, tetapi tidak dapat dianggap sebagai bukti bahwa mekanisme yang sama telah berlangsung di Cirebon. (Utomo et al., 2025).

Keterlibatan militer dalam program pangan juga perlu dinilai secara seimbang. Kapasitas organisasi dan mobilisasi dapat membantu kegiatan tertentu, tetapi pembangunan pangan tetap memerlukan keahlian teknis pertanian, partisipasi petani, dan akuntabilitas. Kajian tentang keterlibatan militer dalam program Food Estate Indonesia periode 2020–2024 mengangkat pertanyaan mengenai tata kelola dan kontrol sipil. Karena itu, peran TNI sebaiknya bersifat proporsional dan tidak menggantikan fungsi lembaga sipil yang memiliki mandat serta kompetensi teknis. (Faisol et al., 2025).

Artikel ini membahas tiga persoalan utama: kondisi ketahanan pangan yang relevan dengan Cirebon, bentuk dukungan TNI yang dapat dipertimbangkan berdasarkan penelitian terdahulu, dan penilaian keterlibatan tersebut melalui prinsip Ekonomi Pembangunan Islam. Artikel tidak mengklaim keberhasilan program tertentu tanpa data lapangan, melainkan

ISSN : 3025-9495

menyusun analisis berbasis literatur dan rekomendasi yang dapat diuji melalui penelitian empiris.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode studi pustaka deskriptif-analitis. Sumber dipilih dari artikel jurnal terbitan 2024–2026 yang relevan dengan keterlibatan TNI dalam ketahanan pangan, kondisi pertanian Cirebon, kebijakan pangan, dan prinsip ekonomi Islam. Bahan utama mencakup penelitian tentang model partisipasi TNI AD di Sidoarjo, program ketahanan pangan Kostrad di Sukabumi, pembinaan teritorial, perlindungan lahan pertanian pangan di Cirebon, serta kajian pembiayaan dan pembangunan pangan.

Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam empat tema: basis produksi dan tantangan lokal; bentuk dukungan TNI; relevansi prinsip Ekonomi Pembangunan Islam; serta risiko dan rekomendasi kebijakan. Karena tidak dilakukan wawancara, survei, atau observasi langsung di Cirebon, artikel ini bukan evaluasi empiris atas kinerja Kodim, Koramil, atau Babinsa setempat. Pernyataan kondisi lokal dibatasi pada hal yang didukung sumber, sedangkan bentuk kegiatan yang diusulkan dinyatakan sebagai rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketahanan Pangan dan Kondisi Lokal Cirebon

Ketahanan pangan di tingkat daerah perlu dipahami sebagai hubungan antara produksi, akses ekonomi, distribusi, dan keberlanjutan sumber daya. Wilayah yang memiliki lahan pertanian belum tentu terbebas dari masalah pangan apabila lahan produktif menyusut, biaya produksi meningkat, hasil panen sulit dipasarkan, atau pendapatan petani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penelitian mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon relevan karena menempatkan perlindungan lahan sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang, bukan hanya kegiatan meningkatkan hasil panen dalam satu musim. (Hakim, 2024).

Perlindungan lahan perlu diikuti upaya menjaga nilai ekonomi pertanian bagi masyarakat. Jika pendapatan tidak stabil, petani dapat kehilangan dorongan untuk mempertahankan lahan dan melanjutkan usaha tani. Karena itu, ketahanan pangan juga terkait akses sarana produksi, pengetahuan, pasar, pembiayaan, serta kepastian penyerapan hasil panen. Penelitian lintas provinsi tahun 2026 menempatkan pendapatan pertanian, tantangan produksi, dan dukungan kebijakan sebagai faktor yang perlu dilihat bersama dalam memahami ketahanan rumah tangga petani. (Ganesh Kulkarni, M. Dobe, M. Ravi, R. Verma, S. Dutt, S. Dutta, 2023).

Cirebon memiliki wilayah dengan karakteristik sumber daya yang berbeda. Kebutuhan petani sawah tidak selalu sama dengan pelaku usaha garam, nelayan, peternak, atau pengolah pangan. Studi tentang usaha garam rakyat di Bungko Lor menegaskan pentingnya memahami kerentanan usaha berbasis sumber daya lokal. Oleh sebab itu, program ketahanan pangan tidak seharusnya memakai satu pola seragam untuk semua desa, tetapi perlu memetakan kebutuhan sesuai komoditas, lingkungan, akses pasar, dan mata pencaharian masyarakat. (Agustya et al., 2024).

Untuk Kota Cirebon, kajian pemerintah daerah tentang penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal menekankan perlunya menilai ketersediaan pangan, pola konsumsi, serta potensi lokal. Dokumen ini bukan artikel jurnal, tetapi dapat menjadi sumber kebijakan pelengkap dan membantu membedakan konteks kota dengan Kabupaten Cirebon yang memiliki kawasan perdesaan lebih luas. (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

2. Bentuk Keterlibatan TNI dalam Program Ketahanan Pangan

Penelitian tentang partisipasi TNI AD di Kodim 0816/Sidoarjo menunjukkan bahwa dukungan terhadap ketahanan pangan dapat berlangsung melalui koordinasi sumber daya, komunikasi dengan petani, dan kerja sama dengan pemerintah serta petugas pertanian. Studi

ISSN : 3025-9495

tersebut memberi gambaran bahwa satuan teritorial dapat menjadi penghubung dan pendukung pelaksanaan program. Untuk Cirebon, pola serupa dapat dipertimbangkan apabila disusun bersama pemerintah daerah, dinas pertanian, penyuluh, kelompok tani, dan pelaku rantai pasok berdasarkan kebutuhan yang telah diverifikasi. (Utomo et al., 2025).

Peran pertama yang mungkin dilakukan adalah membantu koordinasi lapangan dan mobilisasi kegiatan bersama. Dalam kondisi tertentu, kegiatan pertanian membutuhkan kerja sama untuk membersihkan saluran air, memperbaiki akses menuju lahan, mengatur gotong royong, atau mendukung distribusi bantuan. TNI dapat menjadi unsur pendukung sesuai kewenangannya, sedangkan keputusan teknis mengenai benih, pupuk, pengendalian hama, pola tanam, dan produktivitas perlu dipimpin oleh dinas serta tenaga pertanian yang kompeten.

Peran kedua adalah mendukung kegiatan produktif dan pemanfaatan lahan yang layak secara agronomis. Penelitian tentang program ketahanan pangan Kostrad di Kabupaten Sukabumi membahas hubungan antara kegiatan TNI, produksi pangan, kondisi petani, dan kerja sama dengan kementerian terkait. Kajian tersebut menunjukkan pentingnya menilai program berdasarkan perubahan produksi dan kesejahteraan, bukan hanya banyaknya kegiatan. Namun, hasil di Sukabumi tidak dapat langsung dianggap sebagai dampak program di Cirebon tanpa data lapangan setempat. (Prasetyo, 2025).

Peran ketiga berkaitan dengan kesiapsiagaan distribusi ketika terjadi gangguan akses, bencana, atau kebutuhan penyaluran bantuan. Kajian tentang peran militer dalam ketahanan pangan regional menyebut kapasitas logistik dan mobilisasi sebagai kontribusi yang dapat digunakan pada situasi krisis, tetapi juga mengingatkan adanya tantangan tata kelola dan keberlanjutan jika batas kewenangan tidak jelas. Dengan demikian, dukungan logistik sebaiknya dijalankan bersama lembaga pangan dan pemerintah sipil melalui prosedur serta target yang dapat dipertanggungjawabkan. (Wahyuni et al., 2025).

Peran keempat adalah memperkuat komunikasi antara masyarakat dan lembaga pelaksana. Babinsa atau unsur teritorial dapat membantu menyampaikan informasi program dan menghubungkan keluhan warga dengan instansi yang tepat. Namun, komunikasi harus berlangsung dua arah. Petani perlu memiliki ruang untuk menyampaikan masalah seperti keterlambatan bantuan, biaya produksi, harga jual, dan kesulitan air. Kajian strategi pembinaan teritorial dalam ketahanan pangan menekankan pentingnya pembinaan dan kerja sama dengan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan program. (Pembinaan et al., 2025).

3. Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam

Ekonomi Pembangunan Islam tidak hanya menilai pembangunan melalui peningkatan produksi atau pendapatan agregat. Pembangunan juga perlu memperhatikan distribusi manfaat, perlindungan kelompok rentan, keberlanjutan sumber daya, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan kerangka ini, keberhasilan dukungan TNI di Cirebon sebaiknya dinilai dari kontribusinya terhadap kemampuan petani memproduksi pangan, mengurangi hambatan akses, menjaga penghidupan, dan memperkuat kemandirian komunitas.

Prinsip maqashid syariah dapat menghubungkan ketahanan pangan dengan perlindungan jiwa, harta, dan lingkungan. Artikel tahun 2026 mengenai keselarasan maqashid syariah dan pertanian berkelanjutan menyatakan bahwa praktik pertanian yang memperhatikan lingkungan, pembiayaan yang adil, dan rantai pasok transparan memiliki kesesuaian dengan tujuan pembangunan Islam. Dalam konteks Cirebon, peningkatan produksi tidak seharusnya ditempuh dengan mengabaikan kerusakan tanah, penggunaan sumber daya secara berlebihan, atau hubungan dagang yang merugikan petani. (Pangan & Indonesia, 2026).

Keadilan ekonomi juga berarti manfaat program tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang memiliki modal dan akses lebih besar. Petani kecil, buruh tani, perempuan yang terlibat dalam pengolahan pangan, dan usaha pangan mikro perlu mendapat kesempatan berpartisipasi. Kajian mengenai lembaga keuangan syariah dan ketahanan pangan menyebut pembiayaan syariah sebagai salah satu peluang memperluas akses modal produktif bagi petani kecil,

ISSN : 3025-9495

meskipun penerapannya tetap membutuhkan pengelolaan risiko dan penyesuaian dengan karakter usaha pertanian. (Nasution & K, 2025).

Dari perspektif ini, TNI bukan aktor tunggal yang menentukan keberhasilan pembangunan pangan. Perannya akan lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan jika membantu mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan dukungan pemerintah, lembaga pembiayaan, penyuluh, dan pasar. Kolaborasi tersebut dapat menghindari program yang hanya bersifat seremonial karena petani ikut menentukan masalah, menyusun prioritas, dan menilai hasil kegiatan.

4. Kolaborasi Kelembagaan dan Batas Peran

Ketahanan pangan membutuhkan pembagian kerja yang jelas. Pemerintah daerah menetapkan prioritas dan mengoordinasikan kebijakan; dinas pertanian serta penyuluh memberi pendampingan teknis; kelompok tani menyampaikan kebutuhan dan mengelola kegiatan produksi; pelaku pasar membantu penyerapan hasil; sedangkan TNI dapat mendukung koordinasi lapangan, gotong royong, atau kesiapsiagaan sesuai mandat dan kebutuhan. Pembagian ini mengurangi tumpang tindih kewenangan dan ketergantungan pada satu institusi.

Kajian tentang keterlibatan militer dalam Food Estate Indonesia menunjukkan bahwa peran militer dalam tata kelola pangan menimbulkan pertanyaan tentang kontrol sipil dan batas kewenangan. Hal ini tidak berarti setiap keterlibatan TNI otomatis keliru, tetapi menegaskan perlunya kejelasan tujuan, kewenangan, anggaran, dan evaluasi. Dalam program Cirebon, keputusan teknis mengenai pola tanam, tata ruang pertanian, bantuan input, dan kebijakan pasar harus berlandaskan data serta tetap berada pada otoritas sipil yang berwenang. (Faisol et al., 2025).

Pengukuran kinerja juga perlu melampaui jumlah kegiatan dan dokumentasi acara. Indikator yang lebih bermakna antara lain luas lahan produktif yang terlindungi, produktivitas per hektare, penurunan kehilangan hasil panen, akses pasar, kestabilan pendapatan petani, dan keterjangkauan pangan. Kajian kebijakan fiskal untuk ketahanan pangan lokal di Jawa Timur periode 2018–2024 memperlihatkan pentingnya menghubungkan kapasitas fiskal dan belanja publik dengan hasil ketahanan pangan. Meskipun wilayah penelitian berbeda, pendekatan berbasis indikator dapat menjadi pelajaran untuk evaluasi program di Cirebon.

Transparansi informasi menjadi unsur lain yang tidak kalah penting. Data penerima manfaat, lokasi kegiatan, penggunaan anggaran, dan hasil program perlu terdokumentasi agar dapat ditinjau pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Dengan demikian, dukungan TNI dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan pada kebutuhan nyata.

5. Tantangan dan Rekomendasi untuk Cirebon

Tantangan pertama adalah perbedaan karakter antarwilayah. Kebutuhan lahan sawah, daerah pesisir, kawasan permukiman, dan sentra pengolahan pangan tidak sama. Program yang berhasil di suatu daerah tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa pemetaan masalah karena sumber daya, kondisi air, akses pasar, dan pola usaha memengaruhi hasil. Kajian lahan pertanian pangan berkelanjutan dan usaha garam rakyat di Cirebon memperlihatkan pentingnya memahami basis sumber daya lokal sebelum menentukan prioritas program.(Hakim, 2024) (Agustya et al., 2024).

Tantangan kedua adalah kesinambungan kegiatan. Peningkatan hasil pertanian membutuhkan pemeliharaan saluran air, akses sarana produksi, pendampingan teknis, serta kepastian pasar. Jika kegiatan hanya berlangsung ketika ada program atau kunjungan, manfaatnya dapat cepat berkurang. Karena itu, kegiatan yang melibatkan TNI perlu memiliki rencana tindak lanjut dan lembaga sipil yang bertanggung jawab atas pemeliharaan.

Tantangan ketiga adalah menjaga petani sebagai pelaku utama. Petani tidak seharusnya hanya menjadi penerima instruksi atau bantuan, tetapi perlu terlibat dalam penyusunan prioritas dan penilaian dampak. Model partisipasi TNI AD yang diteliti di Sidoarjo menempatkan pemberdayaan petani dan distribusi sumber daya sebagai unsur penting dukungan pangan. Di

ISSN : 3025-9495

Cirebon, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui musyawarah kelompok tani, konsultasi dengan penyuluh, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. (Utomo et al., 2025).

Tantangan keempat adalah menghubungkan produksi dengan kesejahteraan. Kenaikan hasil panen belum tentu menaikkan pendapatan jika harga turun, biaya input tinggi, atau hasil tidak terserap pasar. Oleh sebab itu, program pangan perlu dipadukan dengan dukungan pascapanen, penyimpanan, pengolahan, akses pembiayaan, dan kemitraan pemasaran. Kajian tentang pembiayaan syariah bagi infrastruktur pertanian menunjukkan bahwa modal produktif dapat mendukung kegiatan pangan, tetapi risiko pembiayaannya juga perlu dikelola secara hati-hati.

Berdasarkan tantangan tersebut, pemerintah daerah bersama unsur TNI dan dinas teknis sebaiknya memulai dengan pemetaan kebutuhan di tingkat desa atau kecamatan. Pemetaan mencakup kondisi lahan, sumber air, komoditas utama, akses jalan, kelompok tani, fasilitas penyimpanan, dan hambatan pemasaran. Setelah itu, bentuk dukungan dipilih sesuai kebutuhan: TNI membantu koordinasi lapangan apabila diperlukan, sementara penyuluh dan dinas pertanian memimpin keputusan teknis. Hasil program kemudian dievaluasi setiap musim tanam dengan indikator produksi, biaya, serapan hasil, pendapatan petani, dan manfaat bagi kelompok rentan.

Rekomendasi berikutnya adalah memperkuat rantai nilai pangan, bukan hanya produksi. Pemerintah daerah dapat mempertemukan kelompok tani dengan penggilingan, koperasi, pasar, pedagang, dan UMKM pengolahan. Pembiayaan produktif yang sesuai prinsip syariah dapat dipertimbangkan melalui lembaga kompeten dengan akad dan risiko yang jelas. Seluruh kegiatan perlu melibatkan petani dalam pengambilan keputusan serta menyediakan informasi terbuka tentang anggaran dan hasil, sehingga program menjadi bagian dari pembangunan jangka panjang.

KESIMPULAN

Keterlibatan TNI dalam mendukung ketahanan pangan di Cirebon berpotensi membantu koordinasi lapangan, komunikasi dengan masyarakat, kegiatan gotong royong, dan kesiapsiagaan distribusi. Penelitian dari daerah lain menunjukkan bahwa satuan teritorial dapat mendukung pemberdayaan petani dan menghubungkan berbagai pihak. Namun, sumber yang ditelaah belum cukup untuk menyimpulkan bahwa semua bentuk dukungan tersebut telah berjalan atau terbukti berdampak di Cirebon. Kesimpulan mengenai pelaksanaan dan dampak aktual memerlukan data primer dari satuan TNI, dinas pertanian, kelompok tani, dan masyarakat.

Dalam perspektif Ekonomi Pembangunan Islam, program pangan harus menghasilkan kemaslahatan, membagi manfaat secara adil, menjaga sumber daya, dan memperkuat kemandirian petani. Oleh karena itu, keterlibatan TNI idealnya bersifat pendukung dan kolaboratif, sementara kebijakan, urusan teknis pertanian, dan evaluasi tetap melibatkan lembaga sipil yang berwenang. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan, melainkan dari perubahan produktivitas, pendapatan, akses pangan, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat.

Arah kebijakan yang disarankan adalah membangun kerja sama lintas lembaga berdasarkan pemetaan lokal, memperjelas batas peran, menjaga transparansi, dan melakukan evaluasi partisipatif. Pendekatan ini memungkinkan dukungan TNI menjadi bagian dari pembangunan pangan yang terukur tanpa mengabaikan keahlian teknis, partisipasi masyarakat, dan prinsip ekonomi Islam.

ISSN : 3025-9495

DAFTAR PUSTAKA

Agustya, N., Sapanli, K., & Nuva. (2024). Kerentanan Usahatani Garam Rakyat di Desa Bungko Lor Kabupaten Cirebon. *Indonesian Journal of Agricultural Resource and Environmental Economics*, *3*(2), 116–127. https://doi.org/10.29244/ijaree.v3i2.57894

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). No Title No Title No Title No Title. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 02/Pj/2018*.

Faisol, W., Herdiawanto, H., Candialmeera, A. N., & Jihadine, N. (2025). Militerisasi Agrikultur : Keterlibatan Militer Dalam Program Food Estate Indonesia 2020-2024. *Keamanan Nasional*, *11*(2), 205–226.

Ganesh Kulkarni, M. Dobe, M. Ravi, R. Verma, S. Dutt, S. Dutta, S. S. (2023). *No Title No Title No Title No Title*. *6*, 6–24.

Hakim, D. L. (2024). Identifikasi Karakteristik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2B) Di Kabupaten Cirebon. *Agrika*, *18*(1), 33–47. https://doi.org/10.31328/ja.v18i1.5757

Nasution, R. A., & K, K. (2025). Evaluasi Efektivitas Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, *3*(1), 80–89. https://doi.org/10.61579/future.v3i1.348

Pangan, K., & Indonesia, D. I. (2026). *Frontier Agribisnis The Alignment of Maqashid Syariah Principles with Sustainable*. *10*(2).

Pembinaan, S., Tentara, T., Dalam, I., Ketahanan, M., & Nasional, P. (2025). *Strategi Pembinaan Teritorial Tentara Indonesia Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional*. *1*(2).

Prasetyo, A. (2025). Implementasi Peran TNI dalam Mewujudkan Swasembada Pangan Terhadap Peningkatan Ketahanan Nasional (Studi Kasus Program Ketahanan Pangan Kostrad di Kabupaten Sukabumi) Implementation of TNI's Role in Realising Food Self-Sufficiency towards Increasing Natio. *Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, *9*(2), 243–254. https://doi.org/10.30595/jssh.v9i2.24017

Utomo, B., Marjono, Tarno, H., & Hidayati, B. (2025). The Participation Model of the Indonesian Army in Supporting the National Food Security Strategy: a Case Study at Kodim 0816/Sidoarjo. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, *5*(3), e04435. https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n03.pe04435

Wahyuni, W., Lathifatuddini, L., & Tofani, I. (2025). Food Security Diplomacy: The Role of the Military in Regional Food Security. *Civil and Military Cooperation Journal*, *2*(2), 47–52. https://journal.civiltary.com/index.php/civiltary/index